



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Oktober 2018

Halaman: 1

**TAK EFISIEN DAN MEMBERATKAN PASIEN**  
**Rujukan Berjenjang BPJS Kesehatan**  
**Didesak Ditinjau Ulang**

**UMBULHARJO (MERAPI)**- BPJS Kesehatan baru saja mengeluarkan kebijakan baru tentang rujukan berjenjang yang mengharuskan pasien dirujuk ke rumah sakit tipe D terlebih dahulu. Pemkot Yogyakarta pun bereaksi mendesak sistem itu ditinjau ulang. Sebab, sistem baru itu dinilai tidak efisien dan tidak bisa memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang tengah dalam kondisi sakit.

"Pemkot melalui walikota sudah meminta agar sistem rujukan berjenjang itu ditinjau kembali karena tidak efisien, memberatkan dan menjadikan pelayanan kesehatan yang cepat tidak tercapai," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi kepada wartawan, Selasa (9/10).

Dia menjelaskan, dengan sistem rujukan berjenjang, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tipe A butuh waktu **\* Bersambung ke halaman 9**

---

**Rujukan** .....

setidaknya hingga 5 hari. Mulai dari puskesmas ke tipe D membutuhkan waktu 1 hari, ke tipe C, lalu tipe B dan rumah sakit tipe A. Apalagi jika dalam satu kota rumah sakit tipe C dan D penuh, tapi tidak bisa langsung mengakses ke rumah sakit tipe B seperti di RS Jogja. Akibatnya warga harus mencari rumah sakit tipe D dan C ke kabupaten lain seperti Bantul dan Kulonprogo.

"Warga yang dekat dengan pelayanan kesehatan kalau harus dengan sistem rujukan berjenjang itu malah jadi lebih jauh. Misalnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tipe A seperti RS Sardjito butuh waktu sehari-hari karena harus ke RS tipe D dahulu. Itu dari sisi manajemen pengelolaan medis sudah tidak layak," terangnya.

Di samping itu, menurut Heroe, juga akan menambah beban biaya transportasi bagi warga karena akses pelayanan kesehatan jauh. Menurutnya, dengan sistem rujukan harus berjenjang ke rumah sakit tipe D justru membuat pembiayaan dari BPJS lebih mahal. Karena kapitasi jasa pemeriksaan yang dibayarkan dari tipe D sampai tipe A harus dilalui. Berbeda jika dari puskesmas langsung ke rumah sakit tipe tujuan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan pasien di tipe B maupun tipe A.

"Kalau berjenjang waktunya panjang, padahal ada yang kondisi sakitnya perlu pelayanan yang cepat. Makanya kami minta ditinjau ulang. Alternatifnya kembali ke sistem seperti semula atau ada model-model lain yang lebih efisien," papar Heroe.

Secara terpisah salah seorang warga Badran, Pringgokusuman, Yogya, Ina Ariyanti menilai pelayanan sistem rujukan berjenjang memberatkan pasien. Dia yang sebelumnya bisa mengantarkan ibunya yang sakit mengakses pelayanan ke rumah sakit tipe B harus berjenjang mulai dari tipe D. Dia bahkan berencana menurunkan kepesertaan kelas BPJS dari kelas satu ke tiga karena sistem rujukan harus berjenjang dinilai tidak adil.

"Sistem itu tidak memberikan pelayanan kesehatan yang cepat. Saya kemarin mengantar ibu kontrol di rumah sakit tipe D dari pukul 10.00 WIB baru bisa selesai terlayani pengambilan obat hingga malam hari. Itu karena banyak pasien yang menumpuk di rumah sakit tipe D. Sedangkan tenaga medisnya tidak siap dengan pasien banyak," kata Ina.

Pelaksana Tugas Direktur RS Jogja Agus Sudrajat mengatakan jumlah pasien yang mengakses layanan kesehatan di RS Jogja berkurang sekitar 30-40 persen sejak diberlakukannya sistem rujukan baru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

"Ada pengurangan jumlah pasien di RS Jogja setelah sistem rujukan online diberlakukan. Hal ini disebabkan sekitar 90 persen pasien RS Jogja adalah peserta jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan," katanya.

Agus yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tersebut, mengatakan jika antrean pasien yang memanfaatkan jaminan kesehatan na-

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. <u>RS Jogja</u>	sional justru terjadi di rumah sakit lain, termasuk di RS Pratama. "Puskesmas juga tetap ramai dengan pasien," katanya.  Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Agung Damar Kusumandaru meminta Pemerintah Kota untuk menyusun peraturan walikota yang akan menyederhanakan sistem rujukan BPJS Kesehatan.  "Saat ini, pasien menumpuk di rumah sakit kelas D atau C karena tidak bisa langsung ke kelas yang lebih tinggi," katanya.	Sedangkan, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto memberikan catatan terhadap sistem rujukan online BPJS yaitu rumah sakit tipe D dan C di Kota Yogyakarta hanya dimanfaatkan oleh warga Kota Yogyakarta saja.  "Saat ini, karena sistem rujukan bersifat terbuka, maka banyak pasien dari Kota Yogyakarta yang justru harus menjalani perawatan kesehatan di luar wilayah karena rumah sakit di kota sudah penuh, tambahannya	(Tri)-d
2. <u>Din. Kesehatan</u>			
3. ....			
4. ....			
5. ....			
✓ <u>Netral</u>			
✓ <u>Biasa</u>			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005